

LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
TAHUN ANGGARAN 2018

Jalan H. Agus Salim No. 2 Kota Baru
Telp. (0741) 446720, 446726, 42669, 41225, 445115, Fax, (0741)
446721,446726
JAMBI

KATA PENGANTAR

Ruang Lingkup pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah salah satu Instansi Pemerintah Daerah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Operasional, Catatan Atas Hasil Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jambi, 31 Desember 2018

Kepala Dinas PUPR
Provinsi Jambi

Ir. MUHAMMAD FAUZI MT
NIP. 19640304 199203 1 004

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi terdiri setelah diperinci dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Hasil Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan Tanggung Jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah direview oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, 31 Desember 2018
Kepala Dinas PUPR
Provinsi Jambi

Ir. MUHAMMAD FAUZI MT
NIP. 19640304 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan Eksekutif.....	iv
Laporan Keuangan.....	vi
A. Laporan Realisasi Anggaran(LRA)	1
B. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	2
C. Neraca	3
D. Laporan Operasional (LO)	4
E. Catatan atas Hasil Laporan Keuangan	5
I. Pendahuluan	6
II. Kebijakan Keuangan dan dan Pencapaian Target Kinerja	9
III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	11
IV. Kebijakan Akuntansi	12
V. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan	27
VI. Penutup	40
Lampiran-lampiran	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas hasil laporan Keuangan, Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2018 ini telah disusun berdasarkan laporan keuangan dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2018 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.618.183.646.073,52 atau mencapai 75,89% dari anggaran Rp.814.571.412.634,00

B. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Anggaran Tahun 2018 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur sisa lebih / kurang dari anggaran pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.

Realisasi perubahan ekuitas pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.4.110.145.099.011,57 atau Defisit LO (Rp.334.430.754.574.93) dan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp.618.183.646.073,57 dari Saldo Awal sebesar Rp.3.822.327.827.578,30

C. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2018 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.111.922.830.728,57 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.213.760.110.802,86 ; aset tetap sebesar Rp.3.387.117.384.063,50 dan Akumulasi Penyusutan aktiva tetap sebesar (Rp.3.517.566.862.670,22); aset lainnya sebesar Rp.511.045.335.862,21 dan Akumulasi Amortisasi Sebesar (Rp.1.170.064.000,00).

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.1.777.731.717,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp.1.777.731.717,00 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2018, adalah sebesar Rp.4.110.145.099.011,57

D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2018 mengenai pendapatan-LO, Beban, Kewajiban, Transfer dan Pos-pos luar biasa pada tanggal pelaporan.

Jumlah laporan operasional per 31 Desember 2018 adalah Defisit sebesar (Rp.334.430.754.574,93) yang terdiri dari Pendapatan LO sebesar Rp.771.532.301,00 dan Beban sebesar Rp.335.202.286.875,93

E. CATATAN ATAS HASIL LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Hasil Laporan Keuangan menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian dan pembuatan laporan keuangan tersebut Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD berpedoman kepada PP No. 24 Tahun 2005 dan petunjuk dan arahan dari BAKUDA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain laporan tersebut menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Laporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2018 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2018 disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 3) Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- 10) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- 11) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016;
- 12) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016.
- 13) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016;
- 14) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016.
- 15) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 16) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2016 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.
- 17) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan
- 3.3.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan SAP

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.2. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.1.3. Neraca
 - 5.1.4. Laporan Operasional
- 5.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Bab VI Penutup

Bab II

Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

2.1. Kebijakan Keuangan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jambi selalu mengacu pada visi Provinsi Jambi yaitu “Jambi Tuntas 2021”, yakni Provinsi Jambi yang Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahtera 2021.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah. Penerimaan di OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berasal dari Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah pada UPTD Balai Pengujian yang memberi jasa Laboratorium dan UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan yang memberi jasa Sewa Alat Berat.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja

No	Program	Target
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang menunjang kegiatan operasional OPD
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan kedisiplinan aparatur
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas sumber daya aparatur
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan efektifitas pencapaian kinerja dan keuangan
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jalan di Provinsi Jambi

7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terlaksananya pembangunan saluran drainase / gorong-gorong di Provinsi Jambi
8	Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai	Terkendalinya banjir dan meningkatkan keamanan pantai
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terpenuhi dan tertatanya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
10	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya pengelolaan air baku
11	Program Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Tertatanya pengelolaan waduk, embung, situ serta penampungan air lainnya.
12	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengaturan Jasa Konstruksi
13	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pemberdayaan Jasa Konstruksi
14	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Terlaksananya pengawasan konstruksi
15	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat
16	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Terlaksananya perencanaan dan peningkatan infrastruktur
17	Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Terlaksananya evaluasi dan pengendalian peningkatan infrastruktur
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur Ke P U an	Meningkatkan sarana dan prasarana
19	Program operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	Meningkatkan pemeliharaan SDA
20	Program Kualitas pengelolaan SDA Terpadu	Meningkatkan kualitas pengelolaan SDA
21	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan pengembangan perumahan dan permukiman
22	Program Pembangunan PSU Perumahan & Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi	Membangun PSU Perumahan & Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi
23	Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan
24	Program Fasilitasi, Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bid. Perumahan	Mamberikan Fasilitasi, Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bid. Perumahan

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.814.571.412.634,00. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.618.183.646.073,00 atau mencapai 75,89% dari anggaran.

Belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Anggaran Belanja tidak langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2018 sebesar Rp.27.327.601.734,- terealisasi sebesar Rp.24.882.032.441,- atau 91,05%. Sedangkan Belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar RP.787.987.310.900,00 terealisasi sebesar Rp.594.073.145.933,52 atau 75.39%.

Pendapatan di OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berasal dari Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah pada UPTD Balai Pengujian yang memberi jasa Laboratorium dan UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan yang memberi jasa Sewa Alat Berat. Target pendapatan pada Tahun 2018 sebesar Rp.743.500.000,00 dan realisasi pencapaian target sebesar Rp.771.532.301,00 terjadi surplus pendapatan sebesar Rp.28.032.301 atau 103.77 %.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2018, antarlain adanya masalah dalam keterlambatan dalam lelang paket pekerjaan, dan adanya permasalahan yang disebabkan oleh faktor alam atau bencana yang menyebabkan adanya paket pekerjaan yang harus terhenti atau putus kontrak.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas dalam pelaporan keuangan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Provinsi Jambi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 adalah basis akrual. Pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2017 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.

A. PENDAPATAN

Pendapatan menyajikan informasi tentang pendapatan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang mempunyai dua UPTD yaitu UPTD Balai Pengujian yang memberi jasa Laboratorium dan UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan yang memberi jasa Sewa Alat Berat, target Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.743.500.000,00 dan realisasi pencapaian target sebesar Rp.771.532.301,00 terjadi surplus pendapatan sebesar Rp.28.032.301,00 atau 103.77 %.

B. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan dari rekening kas Daerah selaku BAKUEUDA / BUD yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung.

Belanja tidak langsung adalah belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Perundangan-undangan yang berlaku sebesar Rp.27.327.601.734,- terealisasi sebesar Rp.24.882.032.441,- atau 91,05%

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dilaksanakan secara langsung dengan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar RP.787.987.310.900,00 terealisasi sebesar Rp.594.073.145.933,52 atau 75.39%.

C. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset:

1. Persediaan;

- a. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan, Nilai Pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b. **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainya seperti donasi/rampasan.

2. Tanah;

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan, Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi pengawasan, nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

4. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6. Aset Tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya-biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyediaan; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termyn yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

D. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, kewajiban pada OPD dalam lingkup Pemerintah Daerah hanya berupa kewajiban kepada kas Daerah berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada Kas Daerah berupa pendapatan yang ditangguhkan.

E. EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Diinvestasikan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan SAP

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRA diukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas. Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015.

2. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

3. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

- a. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
- b. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
- c. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

5. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- 2) pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

Akuntansi Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

6. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi / dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;

- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

7. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo / umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 kalsifikasi sebagai berikut:
 - Kualitas piutang lancar
 - Kualitas piutang kurang lancar
 - Kualitas piutang diragukan
 - Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

8. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);
- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

9. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

A. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;

- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

B. Investasi Non Permanen

1) Investasi dalam bentuk dana bergulir, dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran. Kualitas Dana Bergulir dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori:

- Kualitas Lancar; Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- Kualitas kurang lancar; Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun.
- Kualitas diragukan; Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo.
- Kualitas Macet Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

2) Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:

- Kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- Kualitas kurang lancar, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- Kualitas diragukan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- Kualitas macet, sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

10. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - Tanah;
 - Peralatan dan Mesin;
 - Gedung dan Bangunan;
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Aset Tetap Lainnya;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

11. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;

- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

12. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - Aset lain-lain (Kewenangan PPKD)
 - Aset Tak Berwujud; (Kewenangan SKPD)
 - Aset Lainnya. (Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2016 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

13. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - Utang Jangka Pendek.
 - Utang Belanja
 - Pendapatan diterima dimuka
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - Transaksi dengan pertukaran
 - Transaksi tanpa pertukaran
 - Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - Kejadian yang diakui pemerintah

14. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

15. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

Bab V

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode Januari 2018 s/d Desember 2018 tahun anggaran 2018 OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp.814.571.412.634,00 yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan terealisasi sebesar Rp.618.183.646.073,52 atau 75,89%.

Estimasi pendapatan yang dialokasikan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang mempunyai dua UPTD yaitu UPTD Balai Pengujian yang memberi jasa Laboratorium dan UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan yang memberi jasa Sewa Alat Berat, target Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.743.500.000,00 dan realisasi pencapaian target sebesar Rp.771.532.301,00 terjadi surplus pendapatan sebesar Rp.28.032.300,00 atau 103.77 %.

5.1.2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anggaran Tahun 2018 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur sisa lebih / kurang dari anggaran pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.

Realisasi perubahan ekuitas pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.4.110.145.099.011,57 atau Defisit LO (Rp.334.430.754.574.93) dan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp.618.183.646.073,57 dari Saldo Awal sebesar Rp.3.822.327.827.578,30

5.1.3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2018 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.111.922.830.728,57 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.213.760.110.802,86 ; aset tetap sebesar Rp.3.387.117.384.063,50 dan Akumulasi Penyusutan aktiva tetap sebesar (Rp.3.517.566.862.670,22); aset lainnya sebesar Rp.511.045.335.862,21 dan Akumulasi Amortisasi Sebesar (Rp.1.170.064.000,00).

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.1.777.731.717,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp.1.777.731.717,00 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2018, adalah sebesar Rp.4.110.145.099.011,57

5.1.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2018 mengenai pendapatan-LO, Beban, Kewajiban, Transfer dan Pos-pos luar biasa pada tanggal pelaporan.

Jumlah laporan operasional per 31 Desember 2018 adalah Defisit sebesar (Rp.334.430.754.574.93) yang terdiri dari Pendapatan LO sebesar Rp.771.532.301,00 dan Beban sebesar Rp.335.202.286.875,93

5.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

A. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo kas di Bendahara Penerimaan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca terdiri dari :

Tabel. 1
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah Rupiah
1.	2	3	4
	-	-	
			Rp. 0,-
		Jumlah	Rp. 0,-

B. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran, Jumlah diatas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada kas Negara pada tanggal neraca Rp.0,-

Tabel. 2
Rincian penyetoran kas di Bendahara Pengeluaran

NO	SURAT TANDA SETOR	J U M L A H Rp.
1.	-	-
2.		
3.		
4.		
5.		
	JUMLAH	

C. KAS DI BLUD

Saldo kas di BLUD pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

D. KAS DI BENDAHARA FKTP

Saldo kas di Bendahara FKTP pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

E. KAS DI BENDAHARA BOS

Saldo kas di Bendahara BOS pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

F. KAS LAINNYA

Saldo kas lainnya pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

G. SETARA KAS

Saldo setara kas pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

H. INVESTASI JANGKA PENDEK

Saldo Investasi jangka pendek pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

I. PIUTANG PENDAPATAN

Piutang pendapatan sebesar Rp. 0,- merupakan tagihan pendapatan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

J. PIUTANG LAINNYA

Saldo Piutang Lainnya pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,- merupakan tagihan selain pendapatan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

K. PENYISIHAN PIUTANG

Saldo Penyisihan Piutang pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

L. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Terdapat Saldo Biaya Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2018 Sebesar Rp.282.348.668,33

Tabel. 3
Rincian Asuransi

No	Uraian	Penyedia	Nilai	NOMOR POLIS	Masa berlaku		Sisa Nilai
					Mulai	Selesai	31-Des-18 (Rp)
I	UPTD BALAI PERALATAN DAN PERBEKALAN						
1	Asuransi Kendaraan	PT. ASURANSI JASA TANIA	184.838.000	FP130218000008	27/04/18	27/04/19	61.612.666,67
2	Asuransi Alat Berat	PT. ASURANSI JASA TANIA	199.943.900	IP13121800060	11/07/18	11/07/19	116.633.941,67
	JUMLAH I		384.781.900				178.246.608,33
II	Sekretariat						
1	Kendaraan Dinas	PT JASA RAHARJA PUTERA	86.238.300	121000221071800000	15/06/18	15/06/19	43.119.150,00
2	Kendaraan Dinas	PT. ASURANSI JASA TANIA	75.955.050	FP130218000015	05/09/18	05/09/19	56.966.287,50
	JUMLAH II		162.193.350				100.085.437,50
III	UPTD Balai Pengujian						
1	Kendaraan Dinas	PT BUMIDA BUMIPUTERA	4.381.770	1025022118110000	25/11/18	25/11/19	4.016.622,50
	JUMLAH III		4.381.770				4.016.622,50
	TOTAL (I+II+III)		551.357.020				282.348.668,33

M. PERSEDIAAN.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*Supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Terdapat Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 213.477.762.134,53

Persediaan tersebut terdiri dari persediaan Alat Tulis Kantor, Alat Listrik dan Elektronik, serta Barang Hibah yang akan diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat.

Tabel. 4
Rincian Persediaan

Nomor	JENIS DAN URAIAN PEKERJAAN	SISA	KET
1	ALAT TULIS KANTOR	12.899.900	
2	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	98.500	
3	PERSEDIAAN (BARANG HIBAH YANG AKAN DI SERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA / MASYARAKAT)	213.464.763.734,53	
Jumlah Total		213.477.762.134,53	

N. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen. Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- dan Permanen Sebesar Rp.0,-

O. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.3.387.117.384.063,50

Akumulasi penyusutan aktiva tetap adalah jumlah penyusutan dari tahun lalu dengan tahun berjalan. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.517.566.862.670,22

Tabel. 5
Rincian Aset Tetap

Nomor	Uraian	Saldo	KET
1	Tanah	73.389.014.332,00	
2	Peralatan dan Mesin	117.710.834.234,17	
3	Gedung dan Bangunan	58.401.765.542,69	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.403.223.742.252,58	
5	Aset Tetap Lainnya	243.955.073.428,28	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.003.816.944,00	
7	Akumulasi Penyusutan	(3.517.566.862.670,22)	
Jumlah Total		3.387.117.384.063,50	

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp.8.003.816.944,00 merupakan aset pekerjaan Pembangunan Jalan Kelok Sago (150 M') yang tidak selesai per 31 Desember 2018 dengan progres fisik 68,57%. Sisa pekerjaan tersebut senilai Rp 3.453.777.170,00 diselesaikan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.

P. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal necara. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2018, Rp.511.045.335.862,21. Adapun aset lainnya tersebut terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software) sebesar Rp.1.170.064.000,00; Aset Lainnya yang rusak berat sebesar Rp.19.797.411.631,00; Aset dalam Penguasaan Pihak Lain (Akan di Hibah) sebesar Rp.484.329.838.870,02; dan Aset Lain-lain hasil temuan BPK (Kekuarangan Volume Pekerjaan, Denda, dll) sebesar Rp.6.918.085.361,47.

Akumulasi Amortisasi aset lainnya adalah jumlah amortisasi dari tahun lalu dengan tahun berjalan Tahun 2018 sebesar Rp.1.170.064.000,00

Tabel. 6
Rincian Aset Lain-lain Dan Kekurangan Volume Belanja

NO	URAIAN	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	SISA	BIDANG
				(Rp)	
1	Pengembalian Uang Muka	PT. MARAS BANGUN PERSADA	2013	167.421.400,00	
2	Pengembalian Uang Muka	CV. JAYA TEKNIKA	2013	31.247.400,00	
TOTAL I				198.668.800,00	
Tahun 2014					
1	Pengembalian Uang Muka	PT. PURNA DHARMA PERDANA	2014	67.712.000,00	
2	Pengembalian Uang Muka	CV. SPESIA CENTRADESINDO	2014	29.849.760,00	
3	kekurangan Vol Pekerja Pelindung Tebing Ds Lubuk Resam	CV.TIANG KITO	2014	32.783.593,60	SDA
4	Proyek Pemeliharaan Jalan Akses Bandara Sultan Thaha	PT.ABUN SENDI	2014	6.625,82	SDA
5	kekurangan Vol Pekerja Pelindung Tebing Ds Lubuk Beringin	CV.KAWAT MAS	2014	15.711.296,00	SDA
6	kekurangan Vol Pekerja Pelindung Tebing Ds Lubuk Sayak	CV.SINABANGEN	2014	30.688.940,30	SDA
7	Pemeliharaan Jn Sei Penuh - Jujun - Lempur	PT.ARIEL ABADI KENCANA	2014	171.937.268,76	BM
8	Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Pematang Sujur	PT, ANGGUN DHARMA	2014	5.418.514,08	SDA
9	Pekerjaan Jasa Konsultasi	KJPP	2014	37.615.000,00	TANAH
10	Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.I Sei. Batng Uleh	PT . PONJEN MAS	2014	1.362.243.130,94	SDA
11	Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Penahan Tebing Desa Matagual	PT . PANOJA SEJATI	2014	545.069.550,00	SDA
12	Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sei. Penuh-Siulak Deras-Batas Sumbar(Leter W)	PT . SUMBER TRATINDO UTAMA	2014	183.815.676,69	BM
TOTAL II				2.482.851.356,19	
Tahun 2015					
1	Rehabilitasi Daerah Irigasi Sei Koto Teguh	PT. HANRO	2015	3.687,01	SDA
2	Pembangunan Embung Bandara Sultan Thaha	PT.ANGGUN DHARMA PRATAMA	2015	20.203.432,97	SDA
3	Pembangunan Penahan Tebing Kawasan Pasar Angso Duo	PT . YUNACO ERAMANDIRI	2015	15.703.967,11	SDA
4	Pembangunan Penahan Tebing Sungai Batang Bungkal	PT. IZZATI NUR IKHWAN	2015	12.633.250,21	SDA
5	Pembangunan Pasar Singkut di Sarolangun	PT . BLIMBING SRIWIJAYA	2015	63.937.957,02	CK
6	Optmalisasi Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Bazda	PT . BLIMBING SRIWIJAYA	2015	80.176.207,66	CK
7	Pembangunan Hanggar UPTD Alkal Pasir Putih Jambi	PT. EKA PANCA SEJATI	2015	23.721.555,40	CK
TOTAL III				216.380.057,38	

Tahun 2016					
1	Peningkatan Jalan Merlung Lubuk Kambing Simp Niam	PT. TEMBESI AGUNG	2016	98.105.835,62	BM
2	Pembukaan Jalan Muara Talang-Sei Kradak-Beringin Tinggi-Jangkat	PT. KARYA MASA KINI	2016	318.075.270,64	BM
3	Pemeliharaan Jalan Bagan Pete	PT. ADHI BINA INTI	2016	147.974.074,60	BM
4	Peningkatan Jalan Muara Sabak/Dermaga Ds. Rantau Rasau	PT. USAHA BATANG HARI	2016	111.140.734,04	BM
5	Peningkatan Jalan Sei Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Batas Riau	PT. MURIA INDAH	2016	82.668.673,92	BM
6	Pembangunan Jalan Pauh-Air Hitam-Batas Merangin/Sarolangun	PT. NIAGA RAYA ABADI	2016	98.101.121,41	BM
7	Pemeliharaan Jalan M. Taher-Rangkayo Pingai-Sentot Ali Basa	PT. SANUBARI MEGAH PERKASA	2016	79.971.042,47	BM
8	Pemeliharaan Jalan Basuki Rahmad-Jalan H.Agus Salim	PT. DUA PUTRI PERSADA	2016	65.918.194,34	BM
9	Peningkatan Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi	PT. ABUN SENDI	2016	56.788.350,81	BM
10	Penanganan Longsor DS. Kilangan	PT. WIJAYA KESUMA MANDIRI	2016	14.666.399,21	BM
11	Peningkatan Jalan keliling Danau Kerinci	PT. GIANT EKA SAKTI	2016	11.196.938,07	BM
12	Peningkatan JalanSimpang talang Duku-Ds. Kemingking Dalam	PT. JAYA ABADI SUMBER PASIFIK	2016	4.391.226,14	BM
13	Peningkatan Jalan Muara tebo-Simpang Logpon	PT. HANRO	2016	3.240.120,00	BM
14	Peningkatan jalan simpang Betung Berdarah-Pintas- Batas Kab.Tebo	PT. HANRO	2016	3.084.589,73	BM
15	Kelebihan Kontrak Peningkatan Jalan Merlung Lubuk Kambing Simp Niam	PT. TEMBESI AGUNG	2016	331.056.125,80	BM
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sei. Batang Uleh Kabupaten Bungo	PT. EKA PANCHA SEJATI	2016	-	BM
17	Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Nipah Panjang I-II Kab. Tanjab Timur	PT. PUTRA SERANTAU ALAM	2016	-	SDA
18	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci	PT. PUTRA SERANTAU ALAM	2016	-	SDA
19	Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Simpang Puding Kab. Tanjab. Timur	PT. OKYDO JAYA	2016	-	SDA
TOTAL IV				1.426.378.696,80	

Tahun 2017					
1	Paket Pekerjaan Jalan Air Hitam-Simpang Jelatang	PT.DUA PUTRI PERSADA	2017	-	BM
2	Paket Pekerjaan Sip. Margoyosa-Sumber agung	PT.SAMUDERA INDAH	2017	-	BM
3	Paket Pekerjaan Sip. Kodim - Sip.Taang Kawo	PT. WAHYUNATA ARSITA	2017	-	BM
4	Peningkatan Jalan Patimura-Baharudin	PT.SANUBARI MEGAH PERKASA	2017	-	BM
5	Peningkatan Jalan Bagan Pete	CV.ARON PUTRA PRATAMA MANDIRI	2017	-	BM
6	Peningkatan Jalan Slamet Riyadi-Jalan Urip Sumoharjo	PT.JAYA ABADI SUMBER FASIFIK	2017	-	BM
7	Peningkatan Jalan Diponegoro-Jalan Hasyim Ashari	PT. GENTALA JAMBI JAYA	2017	-	BM
8	Peningkatan Jalan Pauh- Air Hitam- Bts Kab.Sarolangun/Kab. Merangin	PT. BINTANG MEGA RAKSA	2017	-	BM
9	Peningkatan Jalan Pauh- Lubuk Napal-Sipintun- Bts Sumsel	PT. ARDI PUTRA SANGKAN	2017	-	BM
	Temuan BPK Semester I 2018			-	
10	Peningkatan Jalan Sei. Saren - Teluk Nilau - Senyerang - Bts. Riau	PT. SARANG TEKNIK CANGGIH	2017	60.002.500,31	BM
11	Peningkatan Jalan Senyerang - Sei. Rambai - Tebing Tinggi	PT. FADLI SATRIA JEPARA	2017	854.883.635,49	BM
12	Peningkatan Struktur Jalan Tempino - Ma. Bulian	PT. CHALIK SULAIMAN BERSAUDARA	2017	1,50	BM
13	Peningkatan Jalan Simpang Penerokan - Sei. Bahar	PT. SUMBER SWARNANUSA	2017	-	BM
14	Peningkatan Jalan H. Adam Malik - Jl. Abdul Rahman Saleh	PT. EKA PANCA SEJATI	2017	569.327.919,14	BM
15	Peningkatan Jalan Muaro Tebo - Simpang Logpon	PT. RUDY AGUNG LAKSANA	2017	275.173.199,21	BM
16	Peningkatan Jalan Simpang Sawmil - Simpang Logpon	PT. BUMI DELTA HATTEN	2017	5.775,47	BM
17	Peningkatan Jalan Sei. Salak - Pkn Gedang / Btg Asai	PT. PERDANA LOKAGUNA	2017	-	BM
18	Peningkatan Jalan Simpang Pelawan - Sei. Salak	PT. PERDANA LOKAGUNA	2017	-	BM
19	Peningkatan Jalan PKN Gedang - Muara Talang	PT. NAI ADHIPATI ANOM	2017	99.999.927,77	BM
20	Pembangunan Jalan Akses Bandara Sulthan Thaha Jambi	PT. BELIMBING SRIWIJAYA	2017	350.000.000,00	BM
21	Peningkatan Jalan Simpang Talang Kawo - Simp. Pulau Rengas	PT. SAMUDRA INDAH	2017	-	BM
22	Penanganan Longsoran Jalan Sp Pulau Rengas - Ma Siau - Dusun Tuo - Jangkat	PT. MAHA RUPA ABADI	2017	-	BM
23	Peningkatan Jalan Sp Pulau Rengas - Ma Siau - Dusun Tuo - Jangkat	PT. WAHYUNATA ARSITA	2017	-	BM
TOTAL V				2.209.392.958,89	

Tahun 2018					
1	Peningkatan Struktur Jalan Tempino - Muara Bulian Kab. Batanghari	PT. KARYA BAHARI	2018	166.164.741,21	BM
2	Peningkatan Jalan Air Hitam - Simpang Jelatang	PT. DUA PUTRI PERSADA	2018	-	BM
3	Peningkatan Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam	PT. RAMA UTAMA MANDIRI	2018	-	BM
4	Penanganan Longsoran Jalan SP. PL. Rengas - Ma Siau - Dsn Tuo - Jangkat	PT. BANGUN YODYA PERSADA	2018	-	BM
5	Peningkatan Jalan Peninjauan - Lubuk Mengkuang - TKA	PT. RAMA UTAMA MANDIRI	2018	-	BM
6	Peningkatan Jalan Rantau Ikil - Batas Sumbar	PT. FAMILI GROUP UTAMA	2018	-	BM
7	Peningkatan Jalan Sangg. Agung - Jujun - Lempur	PT. AIR TENANG	2018	-	BM
8	Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Sei. Penuh	CV. GEOTEKNIK PRIMA RAYA KONSULTAN	2018	-	PRM
9	Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan MBR di Ma. Jambi	CV. TEKNISIA PLAN	2018	-	PRM
10	Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Kota Jambi	CV. MITRA YENUKO PRATAMA	2018	-	PRM
11	Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Sarolangun	CV. DINAMIKA TEKNIK	2018	-	PRM
12	Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan MBR di Kota Jambi	CV. ESTETIKA PANCA SANJAYA	2018	54.376.250,00	PRM
13	Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan Tanjab Barat	CV. MITRA YENUKO PRATAMA	2018	45.050.000,00	PRM
14	Kegiatan Pembekalan dan Fasilitas Uji Kompetensi Tenaga Ahli (Jalan)	CV. SYAH NUSANTARA GROUP	2018	6.455.380,00	BIKON
15	Kegiatan Pembekalan dan Fasilitas Uji Kompetensi Tenaga Ahli Gedung	CV MAHAKARYA CIPTA KREATIF	2018	3.127.250,00	BIKON
16	Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	CV. SYAH NUSANTARA GROUP	2018	4.979.891,00	BIKON
17	Pendidikan Keprofesional Berkelanjutan	CV. MARAWA KREATIF	2018	12.985.000,00	BIKON
18	Kegiatan Pelatihan Ahli K3 Konstruksi	CV. MARAWA KREATIF	2018	10.498.500,00	BIKON
19	Kegiatan Bimbingan Teknis SIPJIKI	CV MAHAKARYA CIPTA KREATIF	2018	6.800.000,00	BIKON
20	Pelatihan Tenaga Ahli Arsitek	CV MAHAKARYA CIPTA KREATIF	2018	5.300.000,00	BIKON

21	Penyusunan Data Base Pertanahan Bidang Ke-PU-an	CV. ELNIWSA KONSULTAN	2018	68.676.480,00	TARU
TOTAL VI				384.413.492,21	
TOTAL KESELURUHAN (I+II+III+IV+V+VI)				6.918.085.361,47	

Q. UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fisik Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 Rp.0,-

R. UTANG BUNGA

Saldo Utang Bunga pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,-

S. BAGIAN LANCAR HUTANG JANGKA PANJANG

Saldo Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per 31 Desember 2018, Rp.0,-

T. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per 31 Desember 2018, Rp.0,-

U. UTANG BEBAN

Saldo Utang Beban pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per 31 Desember 2018, Rp.0,-

V. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 , Rp. 12.171.679.700,00. Jumlah tersebut sesuai dengan putusan No.28/Pdt.G/2017/PN.Jmb sebesar Rp.12.711.105.700,00 ditambah biaya administrasi pengadilan sebesar Rp.574.000,00. Utang tersebut telah dibayarkan senilai Rp.11.000.000.000,00 pada Tahun 2018. Sehingga Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 1.711.679.700,00 .

W. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per 31 Desember 2018, Rp.0,-

X. UTANG BELANJA JASA KANTOR

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.66.052.017,-

Tabel. 6
Rincian Utang Belanja Jasa Kantor

Nomor	Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.106.403,00	
2.	5.2.2.03.02	Belanja Air	3.488.240,00	
3.	5.2.2.03.02	Belanja Listrik	61.457.374,00	
JUMLAH			66.052.017,00	

Y. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

Z. EKUITAS

Saldo Ekuitas pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.110.145.099.011,57

INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA.

1. Informasi Tambahan

Semua kegiatan keuangan dikuasakan sesuai sub bidang masing-masing, kecuali cek ditandatangani Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran.

2. Pengungkapan lainnya

Domisili tempat Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi di Kota Jambi.

Bab VI

Penutup

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

- **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.618.183.646.073,52 atau mencapai 75,89% dari anggaran Rp.814.571.412.634,00

- **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Realisasi perubahan ekuitas pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.4.110.145.099.011,57 atau Defisit LO (Rp.334.430.754.574.93) dan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp.618.183.646.073,57 dari Saldo Awal sebesar Rp.3.822.327.827.578,30

- **NERACA.**

Jumlah aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.111.922.830.728,57 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.213.760.110.802,86 ; aset tetap sebesar Rp.3.387.117.384.063,50 dan Akumulasi Penyusutan aktiva tetap sebesar (Rp.3.517.566.862.670,22); aset lainnya sebesar Rp.511.045.335.862,21 dan Akumulasi Amortisasi Sebesar (Rp.1.170.064.000,00).

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.1.777.731.717,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp.1.777.731.717,00 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2018, adalah sebesar Rp.4.110.145.099.011,57

- **LAPORAN OPERASIONAL**

Jumlah laporan operasional per 31 Desember 2018 adalah Defisit sebesar (Rp.334.430.754.574.93) yang terdiri dari Pendapatan LO sebesar Rp.771.532.301,00 dan Beban sebesar Rp.335.202.286.875,93

**BIAYA DIBAYAR DIMUKA
PERODE 2018 S/D 2019**

LAMPIRAN :

NO	URAIAN	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR KONTRAK	TANGGAL	NOMOR POLIS	Masa berlaku		BIAYA TAHUN 2018 (Rp)	BIAYA TAHUN 2019 (Rp)
						Mulai	Selesai		
I	UPTD BALAI PERALATAN DAN PERBEKALAN								
1	Asuransi Kendaraan	PT. ASURANSI JASA TANIA	075/DPUPR/ALKAL-1/40.07/IV/2018	27-Apr-18	FP130218000008	27-Apr-18	27-Apr-19	123,225,333	61,612,667
2	Asuransi Alat Berat	PT. ASURANSI JASA TANIA	126/DPUPR/ALKAL-1/40.07/VII/2018	11-Jul-18	IP131218000060	11-Jul-18	11-Jul-19	83,309,958	116,633,942
	JUMLAH I							206,535,292	178,246,608
II	Sekretariat								
1	Kendaraan Dinas	PT JASA RAHARJA PUTERA		15-Jun-18	121000221071800000	15-Jun-18	15-Jun-19	43,119,150	43,119,150
2	Kendaraan Dinas	PT. ASURANSI JASA TANIA		10-Sep-18	FP130218000015	5-Sep-18	5-Sep-19	18,988,763	56,966,288
	JUMLAH II							62,107,913	100,085,438
III	UPTD Balai Pengujian								
1	Kendaraan Dinas	PT BUMIDA BUMIPUTERA		13-Nov-18	1025022118110000	25-Nov-18	25-Nov-19	365,148	4,016,623
	JUMLAH III							365,148	4,016,623
	TOTAL (I+II)							269,008,352	282,348,668

Jambi, 2 Ji:
AKUN

Vivi Sri W
NIP. 1982102!

JUMLAH SP2D (Rp)	BIAYA 1 BULAN	KETERANGAN
184,838,000	15,403,167	ALKAL
199,943,900	16,661,992	ALKAL
384,781,900		-
86,238,300	7,186,525	Sekretariat
75,955,050	6,329,588	Sekretariat
162,193,350		-
4,381,770	365,148	Pengujian
4,381,770		-
551,357,020		

anuari 2019
NTANSI

/ahyuni, SE
9 201001 2 005

**PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2018**

Nomor	JENIS DAN URAIAN PEKERJAAN	TOTAL	PEMAKAIAN	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	ALAT TULIS KANTOR	1,209,950,650	1,197,050,750	12,899,900	
2	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	75,000,000	74,901,500	98,500	
3	PERSEDIAAN (BARANG HIBAH YANG AKAN DI SERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA / MASYARAKAT	213,464,763,734.53	0	- 213,464,763,735	
Jumlah Total		214,749,714,385	1,271,952,250	213,477,762,135	

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI

Jambi, Januari 2019
Pembantu Pengurus Barang Pengguna

Ir. MUHAMMAD FAUZI MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640304 199203 1 004

Yulianto, SE
Penata Muda Tk.1
NIP, 19740729 199903 1 005

DAFTAR UTANG JASA KANTOR
PER 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN : IV

NOMOR	URAIAN	JUMLAH TAGIHAN (Rp)	TOTAL TAGIHAN (Rp)
I	LISTRIK		
1	KWITANSI - 143101340011	897,856.00	
2	KWITANSI - 143001283108	1,038,584.00	
3	KWITANSI - 143101557300	2,924,235.00	
4	KWITANSI - 143101596579	7,531,495.00	
5	KWITANSI - 143101480821	16,272,082.00	
6	KWITANSI - 143105181473	7,456,663.00	
7	KWITANSI - 143101686010	394,434.00	
8	KWITANSI - 143101684838	8,900,467.00	
9	KWITANSI - 143101684838	1,115,079.00	
10	KWITANSI - 143000454138	2,880,217.00	
11	KWITANSI - 143101684336	9,634,107.00	
12	KWITANSI - 143001152708	2,412,155.00	
	JUMLAH LISTRIK		61,457,374.00
II	TAGIHAN TELPON		
1	KWITANSI - 0741 42582	113,410.00	
2	KWITANSI - 0741 60487	51,660.00	
3	KWITANSI - 0741 443723	59,360.00	
4	KWITANSI - 0741 446724	48,360.00	
5	KWITANSI - 0741 40952	48,360.00	
6	KWITANSI - 0741 446720	48,360.00	
7	KWITANSI - 0741 446722	48,360.00	
8	KWITANSI - 0741 5912405	688,533.00	
	JUMLAH TELPON		1,106,403.00
III	TAGIHAN AIR		
1	KWITANSI - 6490	437,580.00	
2	KWITANSI - 12142	70,000.00	
3	KWITANSI - 13067	194,500.00	
4	KWITANSI - 35665	2,151,890.00	
5	KWITANSI - 49689	634,270.00	
	JUMLAH AIR		3,488,240.00
	JUMLAH		66,052,017.00